

ISSN: 2615-1995, E-ISSN: 2615-0654 Vol : 2 No. 1, April 2022

DOI:

.470

Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Perspektif Hukum Islam

Moh. Nu'man⁽¹⁾, Afrohatul Laili⁽²⁾ Amanda carolina dara aprilia⁽³⁾ (1), (2) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia Email: (1) moh.newman@gmail.com, (2) afrohatullaili29@gmail.com, amandacdr44@gmail.com⁽³⁾

Informasi artikel ABSTRACT

Sejarah artikel: Diterima: 7 Mei 2022 Revisi: 18 Mei 2022 Dipublikasikan:02 April 2022 DOI

Large-Scale Social Restrictions or better known as PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) is one of the government policies taken to tackle the Covid-19 outbreak from the earth of Indonesia, this policy was taken with the consideration that health factors are the main factors that must be immediately addressed and prioritized over other factors, so that when the health factor has recovered, it will soon be able to build other state sectors such as the social, economic and education sectors which are heavily affected by this policy. This policy was taken with all its controversies because it collided directly with the economic sector, especially for small people who rely on their economy from daily income selling small items on the street. Of course, the policy needs ethical justification in order to become an effective policy, or if this policy is not in line with the public interest of the community, especially the small people, then the people can be ethically justified for what they do in response to this rule in the perspective of Islamic law.

Abtrak

Kata kunci: PSBB. Covid-19, Hukum Islam

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih dikenal dengan istilah PSBB adalah salah satu kebijakan pemerintah yang diambil untuk menanggulangi wabah Covid-19 dari bumi Indonesia, kebijakan ini diambil dengan pertimbangan faktor kesehatan merupakan faktor utama yang harus segera ditangani dan diprioritaskan daripada faktor-faktor yang lain, sehingga ketika faktor kesehatan sudah pulih maka akan segera dapat membangun sektor kenegaraan yang lain semisal sektor sosial, ekonomi dan pendidikan yang sangat terdampak dari kebijakan ini. Kebijakan ini diambil dengan segala kontroversinya karena bertabrakan langsung dengan sektor ekonomi, apalagi bagi rakyat kecil yang mengandalkan ekonominya dari pendapatan harian berjualan kecil-kecilan di jalan. Tentunya kebijakan butuh justifikasi etis agar menjadi sebuah kebijakan yang efektif, atau bila memang kebijakan ini tidak sejalan dengan kepentingan umum masyarakat terutama rakyat kecil, maka rakyat dapat justifikasi etis atas apa yang mereka lakukan dalam merespon aturan ini dalam perspektif hukum islam.

A. PENDAHULUAN

Covid 19 (Corona Virus Desease – 19) adalah wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada tahun 2019. Dengan segala kontrovesinya, wabah ini telah membuat dunia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemuka negeri ini untuk menangani menyebarnya wabah ini.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa dampak yang besar bagi rakyat Indonesia dari segi sosial, ekonomi, pendidikan dan segi-segi kehidupan yang lain. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Bersekala tentana dalam Rangka Besar Percepatan Penangananan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Atau lebih dikenal dengan istilah PSBB.

Aturan PSBB tersebut dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa faktor kesehatan perlu diutamakan untuk diatasi dulu walaupun hal itu mengganggu aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lain, semisal sosial, pendidikan dan aspek ekonomi yang terdampak secara langsung dan sangat signifikan akibat peraturan tersebut.

PSBB menjadi kebijakan yang oleh pemerintah telah dianggap sebagai suatu hal yang terbaik bagi bangsa ini ternyata tidak sedikit menyisakan kontroversi, banya kalangan terutama rakyat kecil yang merasa keberatan karena berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi ketika masa PSBB.

Munculnya kontroversi tersebut membuat kami para penulis mencoba untuk mendedah kebijakan pemerintah yang berupa PSBB tersebut dari tinjauan hukum islam, baik dari dalil-dalil Al-Qur'an, al-Hadits maupun pendapat para ahli fiqh (fuqoha'). Semoga penelitian ini bisa menjadi sumbangan keilmuan islam dan

dapat menjadi referensi rujukan kebijakan kedepannya.

B. Metode

Metode yang kami pakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Kami akan mencoba memahami kebijakan PSBB yang telah diambil pemerintah ini dari sisi hukum islam yang bersumber dari referensi kepustakaan islam, baik al-qur'an, al-hadits, pendapat para sahabat dan para pemikir islam yang bisa kami temukan dalam khazanah hukum islam

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian

Covid-19 menurut World Health Organization (WHO) adalah is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus¹. Atau penyakit yang mudah menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi covid ini merupakan wabah disebabkan oleh virus corona yang memang sangat mudah untuk menyebar, sehingga perlu ada perlakuan khusus menanganinya.

Asal muasal virus corona ini memang masih kontroversi juga, ada pendapat yang mengatakan bahwa virus ini muncul dari pasar hewan di wuhan, China dan dikatakan berasal dari kelelawar. Namun versi lain mengatakan bahwa virus ini adalah *man-made* atau buatan manusia, pemerintah Amerika mengatakan bahwa virus ini dibuat di salah satu labolatorium biologis milik China yang ada di Wuhan, dan pemerintah China mengklaim bahwa virus ini dibawa oleh angkatan bersenjata Amerika yang menjadi delegasi dalam acara olahraga di China.

Wabah dalam bahasa arab adalah مايان . Walaupun para ulama' ada yang membedakan diantara keduanya dengan mengatakan bahwa waba' adalah banyaknya kematian baik disebabkan oleh

¹ https://www.who.int/health-topics/coronavirus.

tho'un maupun tidak, jadi *waba'* lebih umum daripada *Tho'un*.²

2. Wabah dalam hukum islam

PSBB merupakan usaha dari pemerintah untuk melokalisasi wabah sehingga wabah tidak menyebar ke daerah lain. Hal semacam ini sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi:

"apabila kalian mendengar wabah tho'un di suatu tempat maka janganlah kalian memasukinya, dan apabila dalam suatu tempat terjadi wabah tho'un sementara kalian berada didalamnya maka janganlah kalian keluar untuk menghindarinya"

Hadits tersebut memberikan arahan secara termaktub bahwa ketika terjadi wabah tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk keluar masuk daerah yang terpapar. Yang diluar daerah terpapar tidak boleh masuk dan yang berada didalam tidak boleh keluar. Hal ini mirip dengan fenomena PSBB yang menjadi dijalankan oleh pemerintah.

Adapun alasan keharaman untuk keluarmasuk daerah terdampak virus tersebut para pemikir islam berbeda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memasuki daerah yang terpapar wabah merupakan tindakan yang menjerumuskan diri dalam kerusakan yang dilarang oleh agama, sebagaimana dalam ayat

"janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan"

Pendapat kedua menyatakan keharaman tersebut disebabkan untuk mengantisipasi agar seseorang tidak melalaikan urusan agamanya karena keprihatinan mendalam. Pendapat ketiga menyatakan bahwa hal tersebut untuk mengantisipasi hilangnya kesabaran seseorang dikarenakan terserang wabah yang mengerikan dan akhirnya tidak menerima takdir dari Alloh SWT. Dan pendapat terakhir menyatakan bahwa keharama

tersebut disebabkan untuk menghindari kesalahan *i'tiqod* dalam menghadapi wabah yang menimpanya, sehingga ia akan mengatakan "jikalau aku tidak memasuki daerah ini maka aku tak akan tertular".

Motif larangan keluar dari daerah terpapar wabah adalah akan menyebabkan terlantarnya orang-orang yang sakit dan mayat-mayat korban wabah tidak ada yang Mengubur sedangkan keselamatan orang yang keluar tersebut belum bisa dipastikan juga, jadi kemaslahatan yang dicari belum dicapai namun meninggalkan segudang permasalahan yang pasti terjadi, sehingga hal tersebut dilarang. Hal ini disamakan dengan orang yang kabur dari barisan perang yang akan membuat semangat pasukan menjadi menipis dan menafikan toleransi antar Disamping itu, datangnya penyakit dan kematian adalah semata-mata *audroh* dari Alloh SWT. Sebagaimana firman Alloh:

لَهَا تَقْوَرُوا بِبِرِكُمْ لَهِتَ وَلِوَ قُتُمَ نَى بَرُوجَ مِنْهِهِْ berada kematian akan "dimana saja kamu"

dapat menemukanmu, walaupun kau berada di dalam sebuah benteng yang tinggi lagi kokoh" (qs. An-Nisa': 78)

Disisi lain memang ada hadits nabi yang berbunyi:

العدوى والطهرة والعامة والحصفر

"tidak ada penyakit menular, ramalan buruk, arwah gentayangan dan cacing kudirs (yang menular)" (HR. Bukhori Muslim).

Hadits ini menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya penyakit menular, penyakit menular hanya karena takdir dari Alloh SWT saja, sehingga tanpa usaha apapun kita tidak akan bisa terjangkit bila itu sudah ditakdirkan, dan sebaliknya dengan usaha sekeras apapun bila ditakdirkan kita tidak akan bisa lepas dari penyakit tersebut. Namun pendapat ini mestinya digunakan dalam konteks tawakkal kepada Alloh. karena memang sejatinya hal tersebut benar adanya seperti hadits nabi tersebut diatas. Namun dalam konteks ikhtiyar mestinya kita bisa memakai hadits Nabi Muhammad SAW yang awal, yakni yang menjelaskan larangan keluar masuk bagi

² Sulaiman bin Umar, (1996), *Hasyiyatul Jamal.* Juz 1 Hal. 369.

orang-orang ke daerah terjangkit wabah sebagai sebuah tindakan preventif.

3. PSBB sebagai Sebuah Kebijakan Pemimpin

PSBB sebagai sebuah kebijakan sebenarnya dapat ditemukan analoginya dalam larangan Nabi SAW untuk keluar masuk daerah terdampak wabah bagi masyarakat. Namun dalam penerapannya mestinya tetap memperhatikan semua aspek secara komperehensif. Karena semua tindakan pemerintah memang (imam) harus sesuai dengan maslahah/kebaikan bagi rakyatnya sebagaimana kaidah

kepada ³ربط المصلية "tindakan seorang pemimpin rakyatnya harus selalu berlandaskan kebaikan"

Pengambilan keputusan yang akan dijadikan kebijakan oleh seorang pemimpin haruslah dimusyawarahkan dengan ahlinya. Karena memang aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin bisa diwajibkan secara syariat harus diikuti oleh masyarakat jika perintah tersebut tidak merupakan sebuah larangan dari Alloh SWT dan perintah itu haruslah sebuah kebijakan yang baik yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan pertimbangan apakah kebijakan itu baik atau tidak harusnya hanya diketahui oleh orang yang ahli didalamnya dan dia benarpunya maksud baik dalam benar pendapatnya (tidak dicampuri dengan kepentingan-kepentingan individu maupun dengan golongan yang bertentangan kepentingan umum). Karena memang kebijakan yang berhubungan dengan covid-19 ini sangat erat kaitannya dengan pendanaan yang besar yang tidak tersentuh pengawasan vang ketat. sehingga kebijakan yang dibuat bila tidak didasari niat yang baik dan hanya untu mencari keuntungan belaka jelas akan merugikan kepentingan masyarakat.

Namun, bila kebijakan tersebut benarbenar di*ikhtiyarkan* sebagai sebuah solusi yang baik bagi seluruh masyarakat indonesia tentunya kebijakan itu haruslah ditaati oleh seluruh masyarakat, dan haram bagi individu dari masyarakat untuk melanggarnya.

Selain kebijakan ini haruslah kebijakan yang baik bagi masyarakat, pemerintah tentunya juga harus mengawasi dengan baik pelaksanaan dari kebijakan ini, jangan sampai pelaksanaan kebijakan ini terlalu kaku dan cenderung dipaksakan, sehingga kebijakan yang aslinya baik ini kemudian disalahpahami oleh masyarakat, sehingga kebijakan itu menjadi sebuah kebijakan yang tidak efektif. Karena bagaimanapun untuk efektifnya aturan perlu adanya substansi, struktur dan kultur yang baik.

4. Kewajiban untuk Patuh pada Keputusan Pemimpin

Sebagai sebuah kebijakan PSBB memang menimbulkan pro dan kontra, terutama bagi rakyat kecil yang hidupnya mengandalkan kerja harian yang memerlukan keluar rumah dan mendapatkan hasil dari bertemu dengan orang lain. Sehingga seringkali kebijakan ini dikeluhkan oleh rakyat kecil. Untuk itu perlu kiranya kita mengetahui bagaimana hukum islam memandang kewajiban patuh bagi masyarakat terhadap pemimpinnya.

Kewajiban rakyat untuk patuh kepada pemimpin sangat mendapatkan perhatian oleh Alloh, sehingga hal tersebut disebutkan secara tekstual di dalam al-Qur'an:

عن أمزوا أطناعوا ملا وأطناعوا الرسرول وأولى الأمر منكم

"wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Alloh, kepada Rasul (utusan Alloh) dan kepada para pemimpinmu" (qs. An-Nisa': 59)

Ayat ini menjelaskan bahwa taat kepada pemimpin merupakan kewajiban yang harus dilakukan, bahkan disandingkan dengan ketaatan kepada Alloh dan *Rosul-Nya*. Karena keberadaan seorang pemimpin merupakan sebuah kemaslahatan tersendiri bagi umat islam, keberadaan seorang pemimpin akan menjadikan suasana

³ Abdurrohman Assuyuthi, (1983) *al-Asybah Wannadhoir*, hal. 81

kondusif sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat, baik kegiatan keagamaan, sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan Namun bila tidak ada seorang pemimpin yang berdaulat maka akan terjadi chaos di tengah masyarakat dan kegiatankegiatan tersebut tak akan mungkin dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, Rosululloh SAW mewanti-wanti untuk selalu taat pada pimpinan walaupun pimpinan itu adalah seorang budak berkulit hitam yang rambutnya seperti dompolan kurma. sebagai gambaran sebuah tentang pemimpin yang tidak ideal versi masyarakat pada waktu itu.

Para ulama' sepakat untuk selalu taat kepada seorang pemimpin, bahkan haram untuk melakukan pemberontakan walaupun pemimpin itu tidak ideal, karena memang keberadaan pemimpin lebih baik daripada tidak ada, ataupun jangan-jangan ketika telah terjadi pemberontakan, tidak akan ada kondusifitas atau malah mendapatkan pemimpin yang lebih jelek, ini sesuai dengan kaidah:

ار، لهاس هام على باب لهصل hal-hal yang در، لهاس هام على باب لهصل menghindari terjadinya Hastruktif itu labib diprioritaskan daripada

destruktif itu lebih diprioritaskan daripada usaha untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik"

kebijakan-kebijakan Namun. dalam spesifik dari seorang pemimpin yang dibuatnya untuk diperintahkan dilakukan oleh rakvat para ulama' berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa jika yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut adalah perkara yang mubah, makruh atau haram secara syariat maka hal itu tidak wajib dilakukan oleh rakyat. Dan ada ulama' seperti imam Romli yang menyatakan bahwa kita wajib taat terhadap semua pemimpin perintah walaupun vang diperintahkan itu adalah sebuah perkara yang diharamkan secara syariat, namun kewajiban taat pada pemimpin atas perintah melakukan suatu perkara yang haram itu hanya secara formal saja (formalitas belaka), dan secara hakikat tidak wajib

taat.4 Sedangkan untuk perkara selain haram (sunat, mubah atau makruh) maka diklasifikasi, jika perintah dengan salah satu ketiga hal tersebut adalah sebuah kebijakan vang baik bagi masyarakat maka wajib ditaati secara formal dan secara hakikat, dan bila ternyata kebijakan tersebut bukan merupakan sebuah kebijakan yang baik bagi masyarakat maka hanya perlu ditaati secara formal saja (formalitas). dimaksud harus taat secara hakikat adalah tersebut berdosa iika tidak seorang mentaatinya.

Klasifikasi kewajiban masyarakat untuk taat pada perintah pemimpin dalam hal (Pembatasan Sosial Bersekala PSBB Besar) inipun mestinya juga bisa kita klasifikasikan sebagaimana diatas bila kita ikut pendapat tersebut. Jadi jika kebijakan merupakan sebuah kemaslahatan (kebijakan yang baik) bagi masyarakat, maka masyarakat harus mematuhinya, dan berdosa bila tidak mematuhinya. Dan bila kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan vang buruk semisal kebijakan ini diambil oleh pemerintah hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, atau hanya karena tekanan pihak-pihak yang untuk berkepentingan mendapatkan keuntungan bagi maupun dirinya golongannya maka tentunya masyarakat tidak haram bila tidak menaatinya.

D. SIMPULAN

PSBB sebagai sebuah kebijakan sebenarnya telah ada rujukan dari hadits Nabi Muhammad SAW tentang penanganan wabah, hadits tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh bagi masyarakat untuk keluarmasuk daerah yang telah terpapar wabah sebagaimana dalam konsep PSBB ini. apakah kejadian covid-19 dengan wabah pada jaman Rasul adalah sama dari semua segi sehingga perlu diambil kebijakan yang sama tentunya butuh kajian yang mendalam dari ahlinya. Dan kementrian kesehatan

61 | JURNAL SINDA Vol. 2 No. 1, April 2022

⁴ Abdurrohman bin Muhammad bin Husain (1994), *bughyatul mustarsyidin*, hal 91.

sebagai ahlinya telah menyatakan demikian sehingga mestinya kebijakan ini juga sudah sesuai dengan aturan kesehatan dan harus diikuti.

Namun Kebijakan yang dibuat pemerintah ini menjadi sebuah keputusan yang harus dilaksanakan masyarakat bila diambil dengan didasarkan pada kepentingan masyarakat, sehingga bila keputusan ini diambil hanya untuk kepentingan individu maupun gologan dan berlawanan dengan kepentingan umum tentunya kebijakan itu hanya wajib ditaati masyarakat secara dhohir (formalitas saja) dan tidak wajib ditaati secara hakiki sehingga tidak berdosa bila melanggarnya.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrohman bin Muhammad bin Husain (1994), *bughyatul mustarsyidin*, beirut, darul fikr.
- Abdurrohman Assuyuthi, (1983) *al-Asybah Wannadhoir*, Beirut, Darul Kutub Alilmiyyah.
- Wahbah Zuhaili, (2009), attafsir munir, Damaskus, Darul fikr.
- Assyarwani dan Ibni Qosim al-'ubadi, (1996), Beirut, Darul Kutub al-ilmiyah.
- Qur'an Karim, (2017), Yogyakarta, UII Press.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhori, (2016), *Shohih Bukhori*, Karachi, al-bushra.
- Muslim bin Hajjaj, (1991) *Shohih Muslim,* Beirut, Darul Fikr.
- Abdulloh bin Sulaiman, (1998), mawahibussaniah, Beirut, Almaktabah Alislami.
- Sulaiman bin Umar, (1996), *Hasyiyatul Jamal*, Beirut, Darul Kutub al-ilmiyah.
- https://www.who.int/health-topics/coronavirus.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).